



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 71 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan <i>last mile</i> menjangkau titik layanan akhir • Pengoptimalan kualitas jaringan internet melalui peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik • Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan) • Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TIK 					
Strategi 6: Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik						
29	Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					
Strategi 7: Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri						
30	Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya local dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal • Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (<i>energy storage system</i>) 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
31	Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)					
Strategi 8: Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan						
32	Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan					
33	Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i>					
34	Perluasan pelayanan tenaga listrik					
	<ul style="list-style-type: none">Instalasi listrik rumah tangga					
	<ul style="list-style-type: none">Program listrik perdesaan					
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian bantuan pasang baru listrik					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 9: Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, dan pembiayaan energi dan tenaga listrik						
35	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan RUED dan RUKD provinsi					
Strategi 10: Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah						
36	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah					
	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan <i>baseline</i> sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
	<ul style="list-style-type: none">Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
37	Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">Inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan dan sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan layanan masyarakat mengenai informasi lingkungan hidup					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan sistem peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
38	Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan, pemanfaatan kayu dengan sistem tebang pilih, penghindaran pembakaran hutan, dan penanganan cepat karhutla					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian tanah dan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai, penertiban pembuangan sampah dan limbah berbahaya, penghijauan, serta penggunaan pupuk yang tepat dan bijaksana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian udara melalui pengurangan emisi dan bahan bakar fosil, penertiban pembuangan asap pabrik dan industri, pengurangan pemakaian klorofluorokarbon (CFC), dan penghijauan tanaman di lingkungan sekitar					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian air laut melalui perlindungan hutan mangrove dan tanaman bakau di area pantai, larangan penggunaan bahan peledak dan pukot harimau, dan larangan pembuangan limbah dan sampah ke laut					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 11: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana						
39	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Riset inovasi dan teknologi kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi data, informasi, dan literasi kebencanaan serta peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan pembangunan berketahanan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana dan pembangunan berketahanan iklim					
<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan						



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 77 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan 					
40	Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan 					
41	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancamn bencana 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancamam bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancamam bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana					
42	Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi sungai dan danau					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berketahanan iklim					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur tanggap bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi danau dan sungai					
Strategi 12: Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik						
43	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kolaborasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana					
44	Penanganan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none">Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya					
	<ul style="list-style-type: none">Penentuan status keadaan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none">Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana					
	<ul style="list-style-type: none">Pemenuhan kebutuhan dasar					
	<ul style="list-style-type: none">Perlindungan terhadap kelompok rentan					
	<ul style="list-style-type: none">Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital					
Strategi 13: Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim						
45	Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 81 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim 					
46	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim 					
Strategi 14: Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon						
47	Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian <i>net zero emission</i>					
48	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan <i>blended</i> dan <i>innovative financing</i> untuk pembangunan rendah karbon					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 15: Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
49	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah					
	• Pemetaan kapasitas dasar Pemerintah Daerah (SDM, keuangan, pelayanan dasar)					
	• Pengembangan data dan informasi administrasi kewilayahan					
	• Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah					
	• Pemantauan dan evaluasi					
50	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien					
	• Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan					
	• Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah					
Strategi 16: Menyusun desain besar penataan daerah						
51	Penyusunan payung hukum penataan daerah					
	• Perumusan kerangka regulasi					
	• Perumusan kerangka kelembagaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Perumusan kerangka pendanaan					
	<ul style="list-style-type: none">Perumusan kerangka pelayanan dan investasi					
Strategi 17: Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus						
52	Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan					
	<ul style="list-style-type: none">Pemetaan pengembangan manajemen talenta ASN/TNI/Polri khusus untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan manajemen talenta ASN dan afirmasi khusus untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan					
	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelibatan Orang Asli Papua (OAP) di kementerian/lembaga sebagai input perbaikan program pengembangan kapasitas					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan kajian kebutuhan afirmasi khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk ASN, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan					
53	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 85 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
Strategi 18: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)						
54	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan implementasi sistem integritas 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 					
Strategi 19: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah						
55	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan asistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu 					
56	Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
57	Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung					
	• Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung					
	• Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kampung					
	• Pendampingan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan					
58	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi					
	• Penguatan peran distrik dalam pemerintahan, pusat inovasi, dan pelayanan publik					
	• Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di distrik yang lebih efektif dan efisien					
	• Peningkatan kapasitas pemerintahan distrik					
Strategi 20: Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)						
59	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					
	• Peningkatan ketersediaan dan data administrasi kependudukan					
	• Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 88 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan agar tetap mendapat jaminan sosial 					
60	Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil 					
Strategi 21: Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu						
61	Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan publik yang integratif 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan publik 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik (<i>e-service</i>)					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan replikasi inovasi pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah					
62	Penguatan <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
63	Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik					
Strategi 22: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan						
64	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan					
65	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan lingkungan pendukung					
	Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan					
	<ul style="list-style-type: none">• Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan 					
66	Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan tata kelola perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk TPPO 					
Strategi 23: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
67	Penguatan pemenuhan hak anak					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak 					
68	Penurunan kekerasan terhadap anak					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan upaya pencegahan serta penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap anak 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus					
Strategi 24: Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda						
69	Pengembangan kewirausahaan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP)					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
70	Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kepemimpinan dan kapasitas manajemen organisasi pemuda, termasuk pemuda perempuan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi pemuda Papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan perilaku seksual berisiko					
Strategi 25: Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						
71	Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat					
72	Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 26: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan						
73	Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan satuan organik yang proporsional dan adaptif					
74	Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pelayanan dasar					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 27: Mendorong proses pembangunan perdamaian (<i>peace building</i>) yang berkelanjutan						
75	Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk					
76	Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial					
	• Integrasi dan sosialisasi pendekatan teritorial dalam sistem pertahanan di Papua					
	• Implementasi pendekatan teritorial					
Strategi 28: Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
77	Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	• Penyusunan kajian, inventarisasi, identifikasi, validasi, dan pemetaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat melalui pusat studi kebudayaan Papua dan kementerian/lembaga terkait					
	• Penyusunan kajian spesifik kewilayahan terkait tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan perencanaan penggunaan tata guna tanah/tata ruang khusus tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat yang dibuat secara partisipatif Pendaftaran dan legalisasi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat 					
Strategi 29: Memperkuat kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
78	Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengutamaan kepentingan hak dan eksistensi tanah adat (<i>communal property right</i>) dalam berbagai objek konversi lahan Penetapan kepemilikan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat sebagai saham dalam kerja sama ekonomi/investasi budaya melalui pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK) Penerapan kompensasi dan dana abadi dalam rangka pemeliharaan dan konservasi hutan dan lahan tanah adat Pengaturan regulasi terkait pemanfaatan dan batas waktu penggunaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi tanah objek reforma agraria (TORA) dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat setempat					
	<ul style="list-style-type: none">Integrasi pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam rencana kerja gugus tugas reforma agraria (GTRA) nasional					
Strategi 30: Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua						
79	Perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penelitian komprehensif terkait budaya, ekonomi, politik, sosial di seluruh wilayah adat Papua sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Pengusulan penetapan lanskap budaya Lembah Baliem sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO					
	<ul style="list-style-type: none">Inventarisasi data sejarah maritim Papua sebagai atribut data pengusulan nominasi jalur rempah ke UNESCO					
	<ul style="list-style-type: none">Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Revitalisasi bahasa daerah berbasis komunitas tutur dan sekolahPelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta					
Strategi 31: Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua						
80	Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan dan fasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif, seperti produk seni rupa, kriya, film, musik, fesyen, kuliner, dan produk berbasis kekayaan budaya lainnya, yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan dan memiliki daya saing di dunia internasionalPengembangan budaya bahari dan sumber daya maritimPengembangan festival budaya dalam rangka promosi budaya antardaerah maupun antarnegara					
Strategi 32: Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua						
81	Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan basis data kebudayaan Papua yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Inventarisasi dan pemetaan sarana prasarana kebudayaan dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan pengembangan taman budaya, museum, sanggar, serta sarana dan prasarana kebudayaan lainnya untuk mengakomodasi kreativitas seni budaya dan jiwa kewirausahaan masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Inventarisasi, pemetaan, dan perencanaan sumber pembiayaan pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (antar-OPD), komunitas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan ekosistem pemajuan kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pemajuan kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Pembentukan OPD yang khusus bertugas untuk menangani urusan kebudayaan					
Strategi 33: Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan						
82	Penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan prestasi seni budaya dan kewirausahaan generasi muda dan pelaku budaya Papua di kancah nasional maupun internasional					
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian beasiswa afirmasi bagi pelaku seni budaya dan kewirausahaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Pemetaan dan penguatan manajemen talenta Papua dalam bidang seni budaya dan kewirausahaan					
Strategi 34: Mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional						
83	Peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan pengembangan pusat studi kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Identifikasi potensi kerja sama internasional di bidang kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Pertukaran misi sosial dan budaya					
	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan <i>Pacific cultural fair</i> di Papua					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

C. MATRIKS FOKUS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PAPUA PRODUKTIF



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 1: Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal						
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)					
	• Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan DUDI					
	• Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan vokasi					
	• Peningkatan akreditasi program studi dan satuan pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Peningkatan dan penguatan peran daerah dalam koordinasi kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penerapan dan penguatan pembelajaran bahasa asing dan karakter kerja sesuai kebutuhan DUDI					
	• Pelaksanaan SMK pusat keunggulan					
	• Revitalisasi SMK sesuai dengan kebutuhan DUDI					
	• Perluasan kesempatan pemagangan dan strategi penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi					
	• Penguatan pemagangan dan penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
2	Pemenuhan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan instruktur vokasi yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelatihan pendidik/instruktur sesuai kompetensi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan kebutuhan pendidik dan instruktur vokasi					
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Upskilling</i> dan <i>reskilling</i> pendidik dan instruktur vokasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemagangan guru/instruktur di industri					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan pendidik dan instruktur vokasi berkualitas di Papua dari lulusan perguruan tinggi Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelibatan praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan peran praktisi industri dalam pembelajaran dan pengajaran vokasi					
3	Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan, kompetensi, dan keahlian, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya memastikan pendirian satuan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan standar dan kebutuhan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja, termasuk identifikasi menyeluruh atas skema sertifikasi kompetensi sesuai potensi daerah bagi Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian bantuan sertifikasi profesi bagi peserta didik pendidikan dan pelatihan vokasi					
	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan kartu pra-kerja					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan pelaksanaan sertifikasi berbasis DUDI					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan dan perluasan lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kebutuhan industri					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kontribusi DUDI dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi					
Strategi 2: Mengembangkan dan membangun pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (<i>skill development center</i>)						
4	Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (balai latihan kerja)					
	<ul style="list-style-type: none">Evaluasi pelaksanaan <i>pilot project skill development center</i> (SDC) beserta identifikasi faktor penentunya					
	<ul style="list-style-type: none">Replikasi praktik baik penyelenggaraan SDC di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Identifikasi pelaku utama dalam pengembangan SDC yang berasal dari kalangan <i>academics, business, community, dan government</i> (ABCG)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Operasionalisasi dan revitalisasi pusat pendidikan vokasi balai latihan kerja (BLK) dan lembaga latihan kerja (LLK) yang sudah ada					
	<ul style="list-style-type: none">Penyiapan lahan, sarana dan prasarana, dan SDM pelatih untuk pusat keahlian ketenagakerjaan dalam rangka penyiapan pemuda yang produktif dan inovatif					
Strategi 3: Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda Papua						
5	Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula					
	<ul style="list-style-type: none">Perluasan konsultasi bisnis bagi wirausaha untuk meningkatkan skala usahanya					
	<ul style="list-style-type: none">Inkubasi usaha bagi <i>start-up</i> atau wirausaha baru					
6	Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Pelatihan dan pendampingan keterampilan wirausaha					
7	Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya Orang Asli Papua (OAP)					
	<ul style="list-style-type: none">Pemetaan potensi pasar dan analisis kebutuhan tenaga kerja (<i>market demand analysis</i>) dan kebutuhan pelatihan (<i>training needs analysis</i>)					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
8	Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif					
	• Pelatihan literasi digital bagi wirausaha baru					
	• Perluasan akses pasar digital bagi wirausaha					
9	Perluasan skema permodalan bagi wirausaha					
	• Pendampingan wirausaha untuk mengakses pembiayaan					
Strategi 4: Menumbuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi serta mengembangkan kemitraan usaha						
10	Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan					
	• Pendampingan pelaku usaha mikro kecil untuk mengakses kredit murah seperti kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan ultra mikro (Umi), dan lainnya					
	• Identifikasi dan verifikasi potensi komoditas serta penyiapan kapasitas daerah					
	• Pengembangan kemitraan usaha strategis antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar					
	• Pengelolaan terpadu UMKM berbasis komoditas unggulan daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
11	Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampung					
	• Penyiapan infrastruktur internet dan ekosistem digital lainnya					
	• Digitalisasi UMKM melalui perluasan akses pasar daring, pembiayaan berbasis digital, dan tata kelola manajemen usaha berbasis digital					
	• Pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pelaku UMKM					
12	Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat					
	• Penguatan kelembagaan koperasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada pengurus dan anggota koperasi					
	• Penciptaan koperasi modern					
	• Penyediaan rumah produksi bersama					
13	Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi					
	• Penguatan permodalan UMKM dan koperasi					
14	Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP)					
	• Pengembangan dan penguatan sentra IKM					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 5: Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha						
15	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah					
	<ul style="list-style-type: none">• Delineasi dan penatausahaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk menunjang investasi					
16	Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan peta potensi investasi di setiap wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi penyusunan regulasi kemudahan berinvestasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan Papua sebagai daerah tujuan investasi internasional					
	<ul style="list-style-type: none">• Promosi potensi investasi Papua di tingkat nasional maupun internasional					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan realisasi investasi di Papua					
17	Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi rencana tata ruang					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan/revisi rencana tata ruang wilayah provinsi					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan/revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan/revisi rencana detail tata ruang					
18	Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang					
Strategi 6: Meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah						
19	Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Integrasi pengelolaan produksi komoditas unggulan daerah untuk memenuhi skala ekonomi dan meningkatkan efisiensi, yang didukung kelembagaan pengelola dan fasilitas produksi dan penyimpanan bersama					
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan standar mutu komoditas unggulan daerah untuk kebutuhan industri dan ekspor					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan kemitraan rantai pasok komoditas unggulan dengan industri pengguna dan eksportir					
20	Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Penarikan investasi berbasis pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan kawasan industri untuk aglomerasi pengolahan komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan standar kualitas produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan kemasan dan sistem penyimpanan modern untuk efisiensi pengelolaan stok dan permintaan					
21	Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan inovasi produk olahan berupa komoditas unggulan daerah berbasis kearifan lokal, riset, dan kreativitas					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan <i>branding</i> produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah					
22	Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan kemitraan rantai pasok produk olahan berbasis komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses ke hasil-hasil riset terapan yang sesuai dengan potensi komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses ke pendanaan untuk investasi dan perluasan usaha pengolahan komoditas unggulan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses ke energi yang terjangkau					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses ke SDM terampil					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses untuk penerapan digitalisasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana uji standar komoditas dan produk olahannya (laboratorium, lembaga penguji, dan lain-lain) 					
Strategi 7: Meningkatkan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua						
23	Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jangkauan pendataan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 60 persen 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) secara berkala melalui sistem informasi mencapai 100 persen 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan data untuk mendukung verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan data dalam perencanaan dan penargetan program penanggulangan kemiskinan (perlindungan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat) 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 8: Meningkatkan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya						
24	Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya					
25	Pemberian kesempatan dan proporsi yang adil dan setara di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, serta budaya					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) penyandang disabilitas di tingkat provinsi untuk memenuhi pembangunan inklusif disabilitas di seluruh bidang, termasuk pendataan, penyediaan layanan dan fasilitas publik (infrastruktur dan transportasi), politik dan keadilan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi inklusif, pendidikan, dan kesehatan					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan dan pelaksanaan peraturan/kebijakan terkait pembangunan inklusif disabilitas di seluruh bidang, termasuk pendataan, penyediaan layanan dan fasilitas publik (infrastruktur dan transportasi), politik dan keadilan pemberdayaan masyarakat, ekonomi inklusif, Pendidikan, dan kesehatan					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk inisiasi Layanan Lansia Terintegrasi					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk perluasan Layanan Lansia Terintegrasi					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi strategi nasional kelanjutusiaan, termasuk Layanan Lansia Terintegrasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Inisiasi penyempurnaan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan asesmen dan layanan sosial kepada kelompok rentan lain, termasuk gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, ODHIV, korban napza, korban perdagangan manusia, dan kelompok rentan lainnya 					
Strategi 9: Meningkatkan pelayanan dan perluasan kepesertaan jaminan sosial						
26	Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor 					
	<ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan kepesertaan dan peningkatan kualitas layanan program JKN yang terukur 					
27	Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan kepesertaan dan peningkatan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terukur 					
Strategi 10: Mengembangkan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru						
28	Kawasan pengembangan ekonomi Laa Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan dan peternakan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan irigasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan balai benih pertanian dan peternakan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tenaga penyuluh 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM sektor pertanian dan peternakan melalui pendidikan dan pelatihan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan petani dan peternak 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rumah produksi 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan distribusi pemasaran					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri berbasis perkebunan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
29	Kawasan pengembangan ekonomi Mee Pago berfokus pada sektor perkebunan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan lahan dan regulasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan irigasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tenaga penyuluh					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan melalui pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan rumah produksi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan distribusi pemasaran					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri berbasis perkebunan, kelautan dan perikanan, serta hilirisasi hasil pertambangan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
30	Kawasan pengembangan ekonomi Saereri berfokus pada sektor kelautan dan perikanan, dengan didukung oleh sektor perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan lahan dan regulasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan irigasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan balai benih pertanian dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tenaga penyuluh					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan SDM sektor pertanian dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan rumah produksi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan distribusi pemasaran					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, kelautan dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
31	Kawasan pengembangan ekonomi Tabi berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan lahan dan regulasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan irigasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tenaga penyuluh					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rumah produksi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan distribusi pemasaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan 					
32	Kawasan pengembangan ekonomi Anim Ha berfokus pada sektor tanaman pangan, dengan didukung oleh sektor perkebunan serta kelautan dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan irigasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan balai benih pertanian dan perikanan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prasarana dan sarana perikanan 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan tenaga penyuluh 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM sektor pertanian dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kelembagaan petani, nelayan, dan pembudi daya ikan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rumah produksi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan distribusi pemasaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, kelautan dan perikanan 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan 					
33	<p>Kawasan pengembangan ekonomi Domberay berfokus pada sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan didukung oleh sektor hortikultura, kelautan dan perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan lahan dan regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan irigasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tenaga penyuluh					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta industri, perdagangan, dan jasa melalui pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan rumah produksi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan distribusi pemasaran					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri berbasis tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
34	Kawasan pengembangan ekonomi Bomberay berfokus pada sektor perkebunan dan peternakan, dengan didukung oleh sektor kelautan dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan lahan dan regulasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan jaringan irigasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan balai benih pertanian, peternakan, dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan prasarana dan sarana perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan tenaga penyuluh					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan SDM sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kelembagaan petani, peternak, nelayan, dan pembudi daya ikan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan rumah produksi					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan distribusi pemasaran					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan industri berbasis perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan investasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Intensifikasi dan ekstensifikasi hasil produksi yang berkelanjutan					
Strategi 11: Membangun destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif						
35	Pengembangan destinasi wisata alam, bahari, budaya, dan minat khusus yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan regulasi mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan industri berbasis pariwisata 					
36	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pariwisata					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pelaku kepariwisataan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan SDM pariwisata terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui pendidikan dan pelatihan 					
37	Peningkatan daya tarik dan standar kualitas destinasi pariwisata					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan promosi pariwisata 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan <i>event</i> rutin dan atraksi pariwisata 					
Strategi 12: Mendorong sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi						
38	Pengembangan sistem perkotaan yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sarana prasarana dan penataan kawasan perkotaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem integrasi angkutan perkotaan yang menjangkau pusat pertumbuhan, pemukiman, pemasaran, dan ibu kota kabupaten/distrik/kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fungsi kota melalui konsep <i>green belts/green boundaries</i> 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan permukiman masyarakat adat terpencil melalui pembangunan kluster pemukiman transisi (<i>new green settlement area</i>) dan sanitasi perkotaan • Terwujudnya sistem tata kota yang aman, nyaman, dan asri 					
39	Penataan kawasan ekonomi di perbatasan negara					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan sarana prasarana penataan kawasan perbatasan negara • Pengembangan sarana prasarana kawasan perbatasan negara untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan balai karantina, imigrasi, dan bea cukai • Pengembangan dan pemanfaatan kebun pangan lokal yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) • Pengembangan koridor ekonomi kawasan perbatasan negara di Yetetkun (Boven Digoel), Batom (Pegunungan Bintang), dan Towe Hitam (Keerom) • Penguatan kawasan perdagangan internasional di kawasan perbatasan negara 					
Strategi 13: Meningkatkan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global						
40	Penjajakan kerja sama ekonomi dalam rangka membuka peluang pasar nasional, regional, dan global					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kebijakan afirmasi terhadap ekspor internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kerja sama ekonomi nasional, regional, dan global					
	<ul style="list-style-type: none">Penjalinan komunikasi publik dengan negara-negara tujuan ekspor					
41	Penguatan dukungan konektivitas dan sarana prasarana pemasaran komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global					
	<ul style="list-style-type: none">Penyiapan regulasi penerbangan dan pelabuhan internasional untuk mendukung kebijakan ekspor					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan sarana prasarana pelabuhan dan bandar udara internasional mendukung ekspor					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan dukungan regulasi ekspor komoditas strategis Papua menuju pasar nasional, regional, dan global					
42	Peningkatan kualitas standar internasional bagi komoditas unggulan strategis Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penyiapan regulasi untuk mendukung kebijakan ekspor					
	<ul style="list-style-type: none">Hilirisasi komoditas unggulan Papua yang memenuhi standar internasional					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi pada kawasan pengembangan ekonomi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
KONDISI PERLU						
Strategi 1: Menyediakan dan mengelola akses air minum dan sanitasi layak dan aman						
43	Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan SPAM berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan peri-urban					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan SPAM bukan jaringan perpipaan di daerah yang belum terlayani SPAM jaringan perpipaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi infrastruktur SPAM terbangun					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan infrastruktur SPAM terbangun (operasi, pemeliharaan, dan perbaikan)					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan teknologi air minum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah					
44	Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan air limbah domestik yang terpadu secara kewilayahan antara sistem terpusat dan sistem setempat sesuai kebutuhan daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan infrastruktur dan layanan pengelolaan persampahan dengan prinsip ekonomi sirkular sesuai karakteristik sampah dan kondisi daerah					
	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) terbangun					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan persampahan)					
45	Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen kebijakan dan rencana penyelenggaraan SPAM					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan pelaksana penyelenggaraan SPAM					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas pelaksana penyelenggaraan SPAM					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen perencanaan dan strategi kebijakan tingkat daerah untuk sanitasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyiapan <i>enabling environment</i> tingkat daerah terkait pengelolaan sanitasi					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas institusi penyelenggara sanitasi di daerah					
46	Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi)					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberian edukasi dan peningkatan permintaan masyarakat terhadap akses air minum aman					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Pemicuan perubahan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) di masyarakat untuk meningkatkan permintaan layanan sanitasi					
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian edukasi dan kampanye pemilahan sampah di sumber kepada masyarakat					
Strategi 2: Menyediakan rumah layak huni yang berkelanjutan						
47	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian baru sesuai karakteristik budaya, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah, khususnya untuk Orang Asli Papua (OAP) pada 7 wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman					
	<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan bermukim					
	<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi penanganan permukiman kumuh pada 7 wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan perumahan serta peningkatan kualitas perumahan berbasis komunitas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
48	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman					
	• Pembangunan dan penyediaan PSU					
	• Penyediaan akses rumah layak huni melalui fasilitasi peningkatan kualitas hunian secara swadaya					
Strategi 3: Membangun dan meningkatkan jalan dan jembatan yang terintegrasi						
49	Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan					
	• Pembangunan <i>backbone</i> /koridor utama jalan nasional Trans Papua					
	• Pemantapan koridor utama jalan nasional Trans Papua					
	• Pembangunan jalan paralel perbatasan					
50	Pembangunan jalan lintas utara dan lintas selatan Pulau Papua untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah					
	• Pembangunan jalan koridor pantai utara					
	• Pembangunan jalan koridor pantai selatan					
51	Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
52	Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal)					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas layanan dasar					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan jalan pendukung kawasan strategis yang dikembangkan (KI Teluk Bintuni dan KEK Sorong)					
	<ul style="list-style-type: none">Percepatan jalan mantap dan fungsional					
Strategi 4: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi darat untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
53	Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan peningkatan terminal, terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan konektivitas antarmoda di koridor utara dan selatan Pulau Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan sistem angkutan umum massal di perkotaan yang dikembangkan					
54	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan					
55	Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
56	Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara					
	• Penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan					
	• Penyediaan layanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara					
	• Penyediaan sarana dan prasarana serta layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara					
57	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan					
58	Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau					
Strategi 5: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi laut untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
59	Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor					
	• Pembangunan dan peningkatan pelabuhan					
	• Pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur kepelabuhanan terbangun untuk pengembangan ekonomi					
	• Peningkatan pelabuhan hub internasional yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan <i>hinterland</i>					
60	Penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut serta jembatan udara					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
61	Penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman					
62	Penguatan mekanisme distribusi logistik					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan rute terjadwal dan optimalisasi depo produk unggulan daerah 					
63	Penyediaan fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran					
Strategi 6: Membangun dan meningkatkan konektivitas transportasi udara untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang						
64	Pembangunan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan bandara perairan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata 					
65	Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/ <i>airstrip</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul/hub 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan bandar udara pengumpul/hub 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan bandara spoke (pengumpan/<i>airstrip</i>) terintegrasi dengan bandara hub 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan bandara spoke (pengumpan/<i>airstrip</i>) terintegrasi dengan bandara hub 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
66	Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan SDM, fasilitas, sarana dan prasarana keselamatan penerbangan 					
67	Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan <i>backbone</i> rute penerbangan perintis terutama di daerah Pegunungan Tengah 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan rute dan subsidi keperintisan angkutan udara 					
68	Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional					
Strategi 7: Mendorong perluasan/pemerataan infrastruktur TIK yang terjangkau dan berkualitas di seluruh Papua						
69	Penciptaan permintaan (<i>demand</i>) atas layanan telekomunikasi					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerja sama penyelenggara telekomunikasi dengan BUMKam di wilayah adat untuk peningkatan permintaan (<i>demand</i>) telekomunikasi serta penyusunan regulasi pendukung untuk inisiatif penciptaan permintaan (<i>demand</i>) 					
70	Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan <i>backbone</i> menjangkau ibu kota kabupaten/kota 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan <i>middle mile</i> menjangkau ibu kota distrik 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Perluasan jaringan <i>last mile</i> menjangkau titik layanan akhir					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengoptimalan kualitas jaringan internet melalui peningkatan kapasitas <i>bandwidth</i> untuk mendukung layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan akses internet pada titik layanan publik (sekolah, fasyankes, kantor pemerintahan)					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan infrastruktur TIK					
Strategi 8: Meningkatkan literasi digital di bidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik						
71	Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik					
Strategi 9: Meningkatkan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan <i>start up</i>						
72	Pengembangan literasi dan keahlian TIK					
Strategi 10: Memperluas pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan						
73	Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi)					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 11: Mendorong diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan industri						
74	Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya lokal• Pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (<i>energy storage system</i>)					
75	Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)					
Strategi 12: Memperkuat dan memperluas pelayanan pasokan energi dan ketenagalistrikan						
76	Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi• Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, serta pelibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada bidang energi dan ketenagalistrikan• Pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk kawasan					
77	Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i>					
78	Perluasan pelayanan tenaga listrik <ul style="list-style-type: none">• Instalasi listrik rumah tangga					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Program listrik perdesaan					
	<ul style="list-style-type: none">Pemberian bantuan pasang baru listrik					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan dukungan penyediaan energi primer untuk listrik					
Strategi 13: Mengembangkan kebijakan pengelolaan, pendanaan, dan pembiayaan energi dan tenaga listrik						
79	Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD)					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan RUED dan RUKD provinsi					
Strategi 14: Menyediakan dan mengelola sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan						
80	Modernisasi sistem irigasi pertanian dan air baku di kawasan industri dan permukiman					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan jaringan irigasi di kawasan sentra pangan					
	<ul style="list-style-type: none">Revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk pemenuhan sumber air baku					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jaringan air baku ke kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan jaringan air baku ke kawasan permukiman					
81	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan bendungan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Rehabilitasi bendungan					
82	Pengembangan daerah irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan embung dan bendung untuk mendukung ekonomi lokal					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan embung, bendung, irigasi, dan irigasi rawa					
83	Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan pelibatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pertanian dalam pengelolaan irigasi					
Strategi 15: Membangun masyarakat Papua yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara, dan tanah, serta pengelolaan sampah dan limbah						
84	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	<ul style="list-style-type: none">Pelibatan materi wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah					
	<ul style="list-style-type: none">Sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan					
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan wawasan lingkungan, pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, dan pengelolaan sampah dalam kehidupan sehari-hari					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan <i>baseline</i> sarana prasarana pengelolaan sampah dan proyeksi timbulan sampah					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemilihan teknologi pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal					
	<ul style="list-style-type: none">• Implementasi pengelolaan limbah dan sampah terpadu dari hulu ke hilir					
85	Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi dan penyusunan <i>database</i> faktor pencemaran dan kerusakan lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan dan sosialisasi sistem informasi lingkungan hidup kepada masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan layanan masyarakat mengenai informasi lingkungan hidup					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan sistem peringatan dini pencemaran dan kerusakan lingkungan					
86	Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian hutan melalui reboisasi dan rehabilitasi hutan, pemanfaatan kayu dengan sistem tebang pilih, penghindaran pembakaran hutan, dan penanganan cepat karhutla					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian tanah dan air melalui pengelolaan daerah aliran sungai, penertiban pembuangan sampah dan limbah berbahaya, penghijauan, serta penggunaan pupuk yang tepat dan bijaksana 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian udara melalui pengurangan emisi dan bahan bakar fosil, penertiban pembuangan asap pabrik dan industri, pengurangan pemakaian klorofluorokarbon (CFC), dan penghijauan tanaman di lingkungan sekitar 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian air laut melalui perlindungan hutan mangrove dan tanaman bakau di area pantai, larangan penggunaan bahan peledak dan pukut harimau, dan larangan pembuangan limbah dan sampah ke laut 					
Strategi 16: Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular						
87	Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (<i>refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover</i>)					
	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sektor prioritas dan peluang penerapan ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dalam penerapan ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rencana aksi terkait ekonomi sirkular 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan pelibatan semua <i>stakeholder</i> dalam penerapan ekonomi sirkular 					
88	Penerapan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan					
	<ul style="list-style-type: none">Integrasi penataan ruang darat dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi penataan ruang darat dan laut berbasis konservasi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan					
Strategi 17: Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil						
89	Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan					
	<ul style="list-style-type: none">Perhitungan daya dukung lingkungan untuk menjadi panduan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan					
	<ul style="list-style-type: none">Penetapan kawasan konservasi perairan pada dokumen perencanaan tingkat pusat dan daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Penyediaan infrastruktur dasar baik di darat maupun laut untuk mendukung kegiatan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan SDM pengawas kawasan konservasi perairan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi perairan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan partisipasi masyarakat adat kawasan konservasi perairan dalam penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan					
90	Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan <i>database</i> biodiversitas pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembaruan <i>database</i> kawasan dilindungi dan spesies pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan spesies kunci pada ekosistem pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi spesies asli dan endemik pada ekosistem pesisir dan laut					
91	Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengawasan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung/konservasi pesisir dan laut					
	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, alga, terumbu karang, dan lainnya					
	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang tangguh bencana dan berkelanjutan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 18: Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan						
92	Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pembatasan biologis yang aman					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kearifan lokal, seperti praktik Sasi di perairan bagian utara Papua					
93	Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil					
	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan dan pengurangan polusi kelautan, baik akibat aktivitas di daratan maupun di lautan					
	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan kawasan ekowisata bahari pada kawasan konservasi dan taman nasional					
Strategi 19: Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan						
94	Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelibatan masyarakat adat dalam konservasi hutan					
95	Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pencegahan kebakaran hutan dan lahan di desa rawan karhutla					
	<ul style="list-style-type: none">• Operasi peredaran hasil hutan ilegal					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan ulang kontrak kerja sama pemanfaatan lahan • Operasi pengamanan kawasan hutan melibatkan masyarakat adat 					
96	Penataan ruang berbasis konservasi					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengimplementasian prinsip konservasi dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan • Integrasi penataan ruang darat dan laut • Integrasi penataan ruang dan permukiman serta perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan pembangunan berketahanan iklim 					
Strategi 20: Mengelola dan memanfaatkan lahan dan jasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan						
97	Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>roadmap</i> provinsi berkelanjutan • Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai prioritas • Pemanfaatan hasil hutan kayu dengan tebang pilih 					
98	Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat					
	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian pengelolaan ekosistem darat berdasarkan pengetahuan lokal masyarakat adat 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan dan lahan 					
99	Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial					
Strategi 21: Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua						
100	Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian kawasan lindung/konservasi pada ekosistem darat Perlindungan kawasan ekowisata 					
101	Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan kajian terhadap keanekaragaman hayati, termasuk spesies kunci, asli, dan endemik pada ekosistem darat 					
102	Penentuan prioritas konservasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis dan pemetaan keanekaragaman hayati Identifikasi sasaran konservasi Kajian kawasan lindung dalam penentuan kawasan lindung tambahan 					
Strategi 22: Memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi multibencana						
103	Penguatan data, informasi, dan literasi bencana					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Riset inovasi dan teknologi kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan industri kebencanaan yang berdaya saing global yang melibatkan masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">• Integrasi data, informasi, dan literasi kebencanaan serta peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan pembangunan berketahanan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman terhadap risiko bencana dan pembangunan berketahanan iklim					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman risiko bencana menuju ketangguhan yang berkelanjutan					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kemampuan penanganan darurat bencana yang andal dan berperan aktif di tingkat regional dan global					
	<ul style="list-style-type: none">• Penanganan darurat bencana berbasis pada ketangguhan bencana secara berkelanjutan					
104	Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing secara global dalam bidang kebencanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sumber daya manusia tangguh yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang kebencanaan secara berkelanjutan 					
105	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multiancaman bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sistem peringatan dini terpadu multiancaman bencana yang berdaya saing global dalam ketangguhan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembiayaan yang partisipatif dalam penanggulangan bencana 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pembiayaan penanggulangan bencana yang berbasis manajemen risiko keuangan Penguatan ketangguhan finansial dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 					
106	Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, dan revitalisasi sungai dan danau					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana Peningkatan kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan pembangunan berketahanan iklim Pengembangan infrastruktur tanggap bencana Penguatan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh bencana Revitalisasi danau dan sungai 					
Strategi 23: Mempercepat penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik						
107	Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kolaborasi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana					
108	Penanganan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya					
	<ul style="list-style-type: none">• Penentuan status keadaan darurat bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan kebutuhan dasar					
	<ul style="list-style-type: none">• Perlindungan terhadap kelompok rentan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital					
Strategi 24: Meningkatkan aksi pembangunan berketahanan iklim						
109	Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi aksi ketahanan iklim melalui pendekatan infrastruktur dan teknologi pada lokasi prioritas Peningkatan kapasitas, tata kelola, dan pendanaan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan berketahanan iklim 					
110	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan ketahanan iklim 					
Strategi 25: Meningkatkan aksi pembangunan rendah karbon						
111	Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas yaitu pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan model sistem dinamik dan skenario kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PRK) Pengembangan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan implementasi pembangunan rendah karbon Pelibatan lembaga nonpemerintah dalam pelaporan aksi pembangunan rendah karbon 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon untuk mendukung pencapaian <i>net zero emission</i> 					
112	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi teknologi dalam mendukung penerapan pembangunan rendah karbon 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan rendah karbon 					
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan potensi pendanaan untuk mendukung penerapan pembangunan rendah karbon 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan <i>blended</i> dan <i>innovative financing</i> untuk pembangunan rendah karbon 					
Strategi 26: Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah						
113	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kapasitas dasar Pemerintah Daerah (SDM, keuangan, pelayanan dasar) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan data dan informasi administrasi kewilayahan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi 					
114	Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan alternatif pembiayaan pembangunan daerah 					
Strategi 27: Menyusun desain besar penataan daerah						
115	Penyusunan payung hukum penataan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka regulasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka kelembagaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka pendanaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan kerangka pelayanan dan investasi 					
Strategi 28: Meningkatkan kualitas aparatur negara dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan otonomi khusus						
116	Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan pengembangan manajemen talenta ASN/TNI/Polri khusus untuk Orang Asli Papua (OAP) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan manajemen talenta ASN dan afirmasi khusus untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap program pelibatan Orang Asli Papua (OAP) di kementerian/lembaga sebagai input perbaikan program pengembangan kapasitas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kajian kebutuhan afirmasi khusus Orang Asli Papua (OAP) untuk ASN, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan 					
117	Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan potensi daerah dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, tidak terbatas dengan pelaksanaan diklat pendidikan maupun pemagangan ASN Papua di kementerian/lembaga 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan portal pendidikan dan pelatihan ASN terpadu oleh Pemerintah Daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dalam pencapaian akuntabilitas melalui pendampingan dan pemanfaatan SPBE 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan kebutuhan dan kompetensi SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan SDM aparatur dalam rangka pelayanan publik 					
Strategi 29: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)						
118	Peningkatan penerapan reformasi birokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas antarunit kerja dan antarinstansi 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan implementasi sistem integritas 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki proses bisnis dan pola kerja struktural-fungsional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi pemerintah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 					
Strategi 30: Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah						
119	Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan teknologi digital 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan asistensi dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu 					
120	Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
121	Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan kampung 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pendampingan kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan 					
122	Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan peran distrik dalam pemerintahan, pusat inovasi, dan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di distrik yang lebih efektif dan efisien 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintahan distrik 					
Strategi 31: Meningkatkan dukungan pelayanan dan penegakan hukum yang inklusif						
123	Percepatan penetapan peraturan daerah turunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan penyusunan regulasi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan regulasi daerah baik Perda, Perdasi, maupun Perdasus • Pendampingan penyusunan Perdasi dan Perdasus 					
124	Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan • Penguatan mekanisme pengelolaan pendanaan pembangunan • Pengembangan tata cara pemisahan dana otonomi khusus dalam struktur APBD • Implementasi tata cara pemisahan dana otonomi khusus dari struktur APBD 					
Strategi 32: Meningkatkan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat						
125	Peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan hukum, HAM, dan antikorupsi • Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta mudah diakses masyarakat umum 					
Strategi 33: Membentuk dan mengoptimalkan forum dialog antarpemangku kepentingan						
126	Pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional					
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan finalisasi strategi komunikasi Papua 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan forum dialog antarsektor dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan forum dialog antarsektor dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan sinergitas forum dialog antarsektor dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas forum dialog antarsektor dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi forum dialog antarsektor dan daerah 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan survei kepuasan dan kepercayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelibatan pemangku kepentingan dalam forum dialog antarsektor yang efektif dan terorganisir 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas pemerintah dan publik dalam komunikasi publik yang selaras dengan agenda nasional 					
Strategi 34: Meningkatkan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansial						
127	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelompok kerja indeks demokrasi indonesia 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan OMS di ruang sipil dan optimalisasi peran bagi masyarakat 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan partisipasi kelembagaan demokrasi lokal dalam pembangunan demokrasi					
128	Peningkatan pemahaman politik, hak-hak, dan wawasan kebangsaan					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih					
	<ul style="list-style-type: none">Pemantapan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan implementasi Pancasila di daerah					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kesetaraan dan kebebasan					
129	Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pelaksanaan gerakan revolusi mental					
Strategi 35: Mendorong peningkatan dan keterbukaan akses serta kualitas informasi dan komunikasi publik						
130	Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional melalui mitra strategis					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pengetahuan badan publik dan masyarakat untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 157 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kepercayaan publik atas informasi kebijakan dan program pemerintah melalui: <ol style="list-style-type: none"> narasi tunggal yang disebarluaskan beragam saluran komunikasi; dan klarifikasi berita hoaks, informasi menyesatkan, dan narasi negatif yang <i>misleading</i> 					
131	Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standardisasi kompetensi bidang dan komunikasi publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang informasi dan komunikasi publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi peran sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di bidang informasi dan komunikasi publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, berdaya saing, dan profesional di bidang informasi dan komunikasi publik secara berkelanjutan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jurnalis berdasarkan standar kompetensi wartawan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas produksi informasi jurnalis sesuai dengan standar kompetensi wartawan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kredibilitas media lokal Papua 					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 158 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Terciptanya masyarakat informasi Papua 					
Strategi 36: Mendorong legalitas administrasi kependudukan terutama Orang Asli Papua (OAP)						
132	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan data administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan akses sosial kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan perlindungan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memiliki dokumen kependudukan agar tetap mendapat jaminan sosial 					
133	Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah yang belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 					
Strategi 37: Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik terpadu						
134	Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)					
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan kelembagaan pelayanan publik 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pelayanan publik yang integratif					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan penyederhanaan prosedur pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan replikasi inovasi pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan inovasi pelayanan publik oleh instansi Pemerintah Daerah					
135	Penguatan <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan pelayanan publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik					
	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan terwujudnya keterbukaan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik yang optimal					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sinergitas pengawasan antara masyarakat dan Pemerintah Daerah					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
136	Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses ko-kreasi dan evaluasi pelayanan publik					
Strategi 38: Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan						
137	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)					
	• Penguatan koordinasi penyelenggaraan PUG					
	• Penguatan integrasi gender di seluruh proses pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan					
	• Penguatan lingkungan pendukung					
138	Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua					
	• Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan					
	• Perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan					
	• Peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan					
139	Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan tata kelola perlindungan perempuan dari kekerasan, termasuk TPPO					
Strategi 39: Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak						
140	Penguatan pemenuhan hak anak					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usianya					
	<ul style="list-style-type: none">Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak					
141	Penurunan kekerasan terhadap anak					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan upaya pencegahan serta penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap anak					
	<ul style="list-style-type: none">Penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus					
Strategi 40: Meningkatkan peran aktif dan kualitas pemuda						
142	Pengembangan kewirausahaan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kompetensi kewirausahaan pemuda yang komprehensif dan berkelanjutan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan akses pasar dan peluang pemasaran, termasuk bagi pemuda Orang Asli Papua (OAP) dan pemuda perempuan					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan ketersediaan dan akses permodalan melalui lembaga permodalan kewirausahaan pemuda (LPKP)					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan dukungan keluarga dan masyarakat melalui advokasi, promosi, dan sosialisasi kewirausahaan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan tata kelola kelembagaan kewirausahaan di daerah dan penciptaan iklim usaha yang produktif					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan pelibatan pihak swasta, inkubator, akademisi, media massa, dan komunitas pemuda dalam rangka peningkatan kapasitas kewirausahaan pemuda					
143	Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kepemimpinan dan kapasitas manajemen organisasi pemuda, termasuk pemuda perempuan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan partisipasi pemuda Papua dalam kegiatan sosial kemasyarakatan					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta pencegahan perilaku berisiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran HIV/AIDS, dan perilaku seksual berisiko					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 41: Merevitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua						
144	Revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan relasi/hubungan kemitraan MRP dengan masyarakat adat, perempuan, dan agama					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kapasitas kelembagaan MRP					
	<ul style="list-style-type: none">Kajian kebijakan, sosialisasi, dan pendalaman terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Perdasus, Perdasi, serta produk hukum terkait					
Strategi 42: Memperkuat kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat						
145	Penguatan kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">Identifikasi basis data masyarakat adat dan sinkronisasi data antar-kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai masyarakat adat (suku/marga) yang perlu pengakuan dan penetapan dengan kebijakan dan regulasi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none">Harmonisasi kebijakan/regulasi yang sejalan dengan kebijakan, pengakuan, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan partisipasi aktif masyarakat adat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan dengan memperkuat dialog masyarakat adat					
Strategi 43: Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat						
146	Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM, dan tata kelola kelembagaan masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">Pendataan dan pemetaan sarana prasarana lembaga masyarakat adat dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas lembaga masyarakat adat di setiap wilayah adat					
	<ul style="list-style-type: none">Pengembangan pembiayaan dan program/kegiatan bagi kelembagaan masyarakat adat dengan memanfaatkan berbagai program fasilitasi dan pemberdayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Penguatan kemitraan di antara lembaga-lembaga masyarakat adat, masyarakat, dan pemerintah dalam proses pembangunan					
	<ul style="list-style-type: none">Pelibatan masyarakat adat untuk aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana desa					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 44: Mendorong pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan						
147	Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan peta jalan pemberdayaan masyarakat adat dengan memperhatikan potensi objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki masyarakat adat					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengolahan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat adat berbasis keret/marga dan pembinaan sanggar masyarakat adat untuk mengembangkan kreativitas sosial, ekonomi, dan budaya					
	<ul style="list-style-type: none">• Optimalisasi peran, kesempatan, dan keterlibatan perempuan adat baik di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan sosial					
Strategi 45: Membangun komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat						
148	Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pemetaan status dan kondisi sosial masyarakat					
149	Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pemberdayaan peran masyarakat dalam menciptakan harkamtibmas					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022–2024	2025–2029	2030–2034	2035–2039	2040–2041
Strategi 46: Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan						
150	Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan					
	<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan kajian, inventarisasi, dan identifikasi wilayah rawan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan kepada personel yang akan melaksanakan tugas keamanan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan masyarakat dalam pertahanan keamanan					
151	Penguatan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pelayanan dasar					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang pendidikan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pembantuan kepada Pemerintah Daerah pada bidang kesehatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 47: Mendorong proses pembangunan perdamaian (<i>peace building</i>) yang berkelanjutan						
152	Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat dan kerukunan antargolongan penduduk					
153	Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial					
	• Integrasi dan sosialisasi pendekatan teritorial dalam sistem pertahanan di Papua					
	• Implementasi pendekatan teritorial					
Strategi 48: Mendorong penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
154	Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	• Penyusunan kajian, inventarisasi, identifikasi, validasi, dan pemetaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat melalui pusat studi kebudayaan Papua, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah					
	• Penyusunan perencanaan penggunaan tata guna tanah/tata ruang khusus tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat yang dibuat secara partisipatif					
	• Pendaftaran dan legalisasi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 49: Memperkuat regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat						
155	Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	<ul style="list-style-type: none">Pengutamaan kepentingan hak dan eksistensi tanah adat (<i>communal property right</i>) dalam berbagai objek konversi lahan					
	<ul style="list-style-type: none">Penetapan kepemilikan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat sebagai saham dalam kerja sama ekonomi/investasi budaya melalui pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan (OPK)					
	<ul style="list-style-type: none">Penerapan kompensasi dan dana abadi dalam rangka pemeliharaan dan konservasi hutan dan lahan tanah adat					
	<ul style="list-style-type: none">Pengaturan regulasi terkait pemanfaatan dan batas waktu penggunaan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat					
	<ul style="list-style-type: none">Implementasi reforma agraria melalui penataan aset dan penataan akses yang mengutamakan hak masyarakat adat setempat					
	<ul style="list-style-type: none">Integrasi pengakuan dan perlindungan wilayah adat dalam rencana kerja gugus tugas reforma agraria (GTRA) nasional					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 50: Melindungi nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua						
156	Perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Penelitian komprehensif terkait budaya, ekonomi, politik, sosial di seluruh wilayah adat Papua sebagai landasan pembangunan berkelanjutan di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengusulan penetapan lanskap budaya Lembah Baliem sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO					
	<ul style="list-style-type: none">• Inventarisasi data sejarah maritim Papua sebagai atribut data pengusulan nominasi jalur rempah ke UNESCO					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi bahasa daerah berbasis komunitas tutur dan sekolah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta					
Strategi 51: Mengembangkan dan memanfaatkan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua						
157	Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan fasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif, seperti produk seni rupa, kriya, film, musik, fesyen, kuliner, dan produk berbasis kekayaan budaya lainnya, yang memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan serta memiliki daya saing di dunia internasional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan festival budaya dalam rangka promosi budaya antardaerah maupun antarnegara 					
Strategi 52: Memperkuat tata kelola pembangunan kebudayaan Papua						
158	Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan basis data kebudayaan Papua yang terintegrasi dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu 					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan pemetaan sarana prasarana kebudayaan dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan taman budaya, museum, sanggar, serta sarana dan prasarana kebudayaan lainnya untuk mengakomodasi kreativitas seni budaya dan jiwa kewirausahaan masyarakat Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi, pemetaan, dan perencanaan sumber pembiayaan pembangunan kebudayaan secara berkelanjutan 					



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 171 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pembiayaan pembangunan kebudayaan Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (antar-OPD), komunitas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berkaitan dengan ekosistem pemajuan kebudayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pemajuan kebudayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan platform teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan OPD yang khusus bertugas untuk menangani urusan kebudayaan 					
Strategi 53: Memperkuat spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan						
159	Penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan prestasi seni budaya dan kewirausahaan generasi muda dan pelaku budaya Papua di kancah nasional maupun internasional 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian beasiswa afirmasi bagi pelaku seni budaya dan kewirausahaan Papua 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan dan penguatan manajemen talenta Papua dalam bidang seni budaya dan kewirausahaan 					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 54: Mengembangkan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional						
160	Peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik					
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan dan pengembangan pusat studi kebudayaan Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Identifikasi potensi kerja sama internasional di bidang kebudayaan					
	<ul style="list-style-type: none">Pertukaran misi sosial dan budaya					
	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan <i>Pacific cultural fair</i> di Papua					
Strategi 55: Memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama						
161	Penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama					
	<ul style="list-style-type: none">Penyusunan peta jalan moderasi beragama di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi dialog lintas budaya, lintas agama/kepercayaan, dan lintas suku bangsa di Papua dalam rangka memperkuat dan mempromosikan moderasi beragama					
	<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi program pelatihan (<i>workshop</i>) peningkatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, termasuk Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat moderasi beragama					
	<ul style="list-style-type: none">Fasilitasi festival seni dan budaya bernafaskan keagamaan dalam rangka memperkuat dan mempromosikan moderasi beragama					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 56: Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan						
162	Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan basis data rumah ibadah di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan model rumah ibadah sebagai pusat syiar agama dan pemberdayaan umat					
	<ul style="list-style-type: none">• Replikasi model rumah ibadah sebagai pusat syiar agama dan pemberdayaan umat					
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana peribadatan					
	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi program peningkatan kapasitas SDM pengelola rumah ibadah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pembiayaan operasional bagi rumah ibadah					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan forum rumah ibadah lintas agama di Papua					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemberdayaan dana sosial keagamaan					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kelembagaan ekonomi umat					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 174 -

No.	Strategi-Prioritas-Fokus	Tahapan Pembangunan				
		2022-2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2041
Strategi 57: Memperkuat peran lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan						
163	Penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong					
	<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan kondisi lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan program/kegiatan lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan sarana dan prasarana lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan pembiayaan bagi lembaga agama dan keagamaan serta FKUB provinsi dan kabupaten/kota					
	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan pengelola lembaga agama dan keagamaan serta FKUB					
	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan dan penguatan <i>early warning system</i> dalam rangka mitigasi risiko konflik bernuansa agama					

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Sufanna Djaman

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO